

ABSTRAK

Korupsi mengakibatkan kerugian keuangan negara, sehingga dalam pemerintasannya juga mengupayakan pengembalian atas kerugian keuangan negara. Pidana penjara dan pidana denda, belum dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akibat korupsi, sehingga perlu dijatuahkan pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti. Akan tetapi, dalam penerapan pidana pem-bayaran uang pengganti masih terdapat hambatan baik dari segi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis mengenai efektivitas, hambatan dan kebijakan atau upaya penerapan pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi di Indonesia berdasarkan UU 31/1999 jo. UU 20/2001.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori efektivitas hukum, teori kepastian hukum, dan teori keadilan.

Hasil penelitian ini adalah : (1) penerapan pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi di Indonesia berdasarkan UU 31/1999 jo. UU 20/2001 sudah efektif namun belum maksimal, karena terjadi tunggakan uang pengganti, dan terdapat hambatan baik dari segi substansi, struktur maupun kultur hukum; (2) hambatan dalam penerapan pidana uang pengganti dari segi : (a) substansi hukum : (i) undang-undang memuat sekelumit ketentuan hukum acara khusus pemberantasan korupsi, (ii) Pasal 18 ayat (3) memberikan celah hukum bagi terpidana untuk tidak membayar uang pengganti, (iii) tidak diatur ketentuan uang pengganti yang tidak dapat dibayar seluruhnya, (iv) tata cara perhitungan konversi pidana penjara, dan (v) perhitungan jumlah pidana uang pengganti; (b) struktur hukum : (i) hakim kesulitan memilah aset hasil korupsi dan menentukan besaran uang pengganti, serta (ii) jaksa kesulitan melacak, melakukan eksekusi penyitaan, dan lelang harta milik terpidana, serta melakukan gugatan perdata, dan (iii) ketidakmampuan penyidik melacak harta terpidana; serta (c) kultur hukum : kurangnya kesadaran masyarakat; (3) kebijakan dalam mengatasi hambatan dari segi : (a) substansi hukum : (i) perubahan ketentuan uang pengganti, (ii) diundangkan RUU Perampasan Aset Kejahatan, (iii) re-evaluasi ketentuan pidana pengganti (subsidiar), (iv) pembaharuan peraturan terkait kewenangan jaksa agung untuk merampas aset hasil korupsi, dan (v) pembalikan beban pembuktian terbatas bidang perdata; (b) struktur hukum : (i) dibentuk kantor pusat pengendali Perampasan Aset Kejahatan, (ii) optimalisasi tugas/fungsi kejaksaan, (iii) tuntutan maksimal jaksa dalam hukuman subsidiar, (iv) tuntutan dan putusan terhadap uang pengganti diganti pidana penjara yang tinggi, (v) penyesuaian sistem administrasi keuangan kejaksaan, (vi) anggaran tersendiri Kejaksaan Agung, (vii) putusan hakim tidak memberikan pidana subsidiar; serta (c) kultur hukum : inisiatif untuk melapor adanya penambahan aset kekayaan penyelenggara negara.

Kata Kunci : Pidana, Uang Pengganti, Tindak Pidana, dan Korupsi

ABSTRACT

Corruption results in a loss of state finances, so in its eradication it also seeks a return on state financial losses. Prison and criminal penalties have not been able to recover state financial losses due to corruption, so additional criminal penalties need to be imposed in the form of criminal payments. However, in the application of criminal payments for substitute money, there are still obstacles both in terms of legal substance, legal structure, and legal culture.

The purpose of this study is to describe, review and analyze the effectiveness, obstacles and policies or efforts to implement substitute money criminal acts of corruption perpetrators of bribery and gratification in Indonesia based on Law No. 31/1999 *jo.* Law No. 20/2001.

This study uses a normative juridical approach, with a descriptive analytical research specification. The data used in this study are secondary data, obtained through library studies, which are then analyzed qualitatively using the theory of legal effectiveness, the theory of legal certainty, and the theory of justice.

The results of this study are : (1) the application of substitute money criminal acts against corruptors of bribery and gratification in Indonesia based on Law 31/1999 *jo.* Law 20/2001 has been effective, but not maximal, due to arrears in substitute money, and there are obstacles both in terms of substance, structure and legal culture; (2) barriers to the application of criminal substitute money in terms of : (a) legal substance : (i) the law contains a small number of legal provisions for the special program to eradicate corruption, (ii) Article 18 paragraph (3) provides a legal gap substitute money, (iii) there is no provision for substitute money that cannot be paid in full, (iv) procedures for calculating prison conversion, and (v) calculation of the amount of criminal substitute money; (b) legal structure : (i) the judge has difficulty sorting out the assets resulting from corruption and deter-mines the amount of substitute money, and (ii) the prosecutor has difficulty track-ing, executing foreclosures, and auctioning off the assets of the convicted person, and (iii) inability of investigators track the assets of convicts; and (c) legal culture: lack of public awareness; (3) policies in overcoming obstacles in terms of : (a) legal substance : (i) changes in provisions on substitute money, (ii) promulgation of Crime Asset Deprivation Bill, (iii) re-evaluation of subsidair provisions, (iv) renewal regulations relating to the attorney general's authority to seize assets resulting from corruption, and (v) reversal of the burden of proof of limited civil matters; (b) legal structure : (i) a controlling office of Criminal Asset Confiscation is formed, (ii) optimization of the prosecutor's duties/functions, (iii) prosecutor's maximum demands in subsidiary penalties, (iv) demands and decisions on subs-titute money are subject to high imprisonment, (v) adjustments to the prosecutor's financial administration system, (vi) the Attorney General's own budget, (vii) the judge's decision does not provide a subsidiary penalty; and (c) legal culture : an initiative to report the addition of assets to state administrators assets.

Keywords : Criminal, Replacement Money, Crime and Corruption